

Judul : Mayoritas Warga Dukung Pengesahan RUU TPKS
Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Mayoritas Warga Dukung Pengesahan RUU TPKS

*Panja Penyusunan
Draf RUU TPKS
memastikan RUU
itu dibawa ke rapat
paripurna pada hari
ini. Setelah itu, RUU
itu akan diserahkan
kepada pemerintah
untuk diterbitkan surat
perintah presiden.*

PUTRI ANISA YULIANI
putri@mediaindonesia.com

MESKI baru 39% masyarakat yang mengetahui pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), mayoritas dari mereka (65%) setuju agar RUU tersebut segera disahkan.

Demikian hasil Survei Lembaga Riset Saiful Mujani atau Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5-7 Januari 2022.

Survei dilakukan terhadap 1.249 responden yang dipilih secara acak. Jumlah 39% itu meningkat dari hasil survei serupa yang dilakukan pada Maret dan Mei 2021 lalu. Waktu Maret warga yang tahu 24%. Mei 2021 36%, sekarang 39%. Dukungan mayoritas terhadap adanya UU tersebut konsisten sejak Maret 2021, "jelas Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam acara survei SMRC yang dirilis secara virtual, kemarin. Menurutnya, dari 39% yang mengetahui soal RUU TPKS, ada 65% responden yang setuju dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar RUU TPKS segera disahkan. (Lihat grafik)

Pun, tambah Saidiman, SMRC melakukan pendalaman. Hasilnya menunjukkan DPR dan pemerintah sudah memiliki legitimasi yang cukup kuat agar RUU TPKS disahkan. Dari sisi massa pemilih partai, di antara yang tahu, mayoritas (lebih dari 50%) dari massa pemilih PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan PAN setuju dengan adanya UU TPKS. Sementara itu, dukungan dari massa pemilih PKS dan Demokrat paling rendah (37%).

Survei tersebut, kata Saidiman, dilakukan dengan metode *multistage random sampling*. Margin of error survei kurang lebih +/-2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Secara terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Draf RUU TPKS, Willy Aditya, memastikan RUU

itu dibawa ke dalam rapat paripurna (rapur), pada hari ini (Selasa, 11/1). Regulasi tersebut akan menjadi hak inisiatif DPR.

"Insya Allah rencananya (akan dibawa ke rapur). Setelah RUU itu dibahas dalam rapur, akan kami serahkan ke pemerintah untuk diterbitkan surat perintah presiden (supres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM)," tambahnya.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pengesahan RUU TPKS tidak bisa ditunda lagi. Tidak perlu ada perdebatan yang akhirnya memperlambat pembahasan dan merugikan masyarakat, terutama korban kejahatan siber.

"Urgensi pengesahan RUU TPKS sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Arah-an Presiden Jokowi terkait itu sudah sangat jelas dan perlu ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan," ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani (*Media Indonesia* edisi Rabu, 5/1).

Tidak pernah menghambat

Wakil Ketua DPR RI, Sumi Dasco Ahmad, mengatakan tidak benar lembaga menghambat proses pengesahan RUU TPKS. Menurutnya, usulan atau inisiatif undang-undang itu justru berasal dari DPR RI.

"Kita akan membuat undang-undang itu dengan bagus. Jadi, kalau ada yang bilang DPR memperlambat segala macam, itu tidak betul," ujarnya.

Dasco mengatakan DPR sangat berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU TPKS untuk menjadi undang-undang. Supaya kasus kekerasan seksual tidak terus terulang, terutama terhadap anak-anak.

Menurutnya, DPR bukannya tidak mau cepat (mengesahkan), tetapi tidak mau terburu-buru supaya menjadi undang-undang yang bagus.

Politisi Partai Gerindra itu juga berharap RUU TPKS akan disepakati oleh semua Fraksi. Karena nanti jika sudah dipaparkan, akan membuka jalan pembahasannya dan tentunya pembahasan itu akan melibatkan semua fraksi yang ada di DPR.

Terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan membahas lanjut Dasco, pembahasan akan diserahkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang nantinya akan menentukan urgensi pembahasan ada di mana.

"Pada pembukaan masa sidang, kita akan segera melakukan Rapim Bamus dan kemudian Paripurna," imbuhnya yang baru saja menemui ibu korban pelecehan seksual anak di Setia Budi, Jakarta Pusat. (lan/MGN/X-7)

Sikap Publik terhadap RUU TPKS dan Permendikbud No 30 Tahun 2021

Masyarakat Mengetahui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

- 39% responden mengetahui RUU TPKS
- 61% responden tidak mengetahui RUU TPKS

Pandangan Masyarakat yang Mengetahui RUU TPKS

- 60% Setuju dengan RUU TPKS
- 36% Tidak setuju dengan RUU TPKS
- 5% Tidak tahu/tidak jawab

Masyarakat Mengetahui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi

- 33% Pernah mendengar
- 67% Tidak pernah mendengar

Dukungan Masyarakat Terkait Permendikbud PPKS

- 47% Sangat mendukung Permendikbud PPKS
- 45% Mendukung Permendikbud PPKS
- 6% Tidak mendukung Permendikbud PPKS

Keterangan:

Survei dilakukan SMRC Consulting pada 8-16 Desember 2021 secara tatap muka dan di-update terakhir pada 5-7 Januari 2022 melalui survei telepon dengan 2.062 responden menggunakan *multistage random sampling*. Tingkat kesalahan 2,2% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Sumber: SMRC/Litbang MI

